



PENGADILAN AGAMA NEGARA

Jln. Negara – Kandangan Km. 3,5 ☎/📠 (0517) 51421

E-mail : pa.negara@gmail.com

Website : <http://pa-negara.pta-banjarmasin.go.id>

Kab. Hulu Sungai Selatan-Prov.Kalsel

Hal : Undangan

30 Januari 2020

Kepada Yth.

Seluruh Anggota Tim Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pengadilan Agama

Negara

Di –

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang efektif dan efisiensi dalam implementasi pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi kebijakan keterbukaan informasi bulan Juni 2020 yang dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : 31 Januari 2020
Waktu : 10.00 s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Pengadilan Agama Negara

Demikian undangan ini disampaikan untuk dapat diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam
Ketua Tim,



Hj. St. Zubaidah, S.Ag.,S.H.,M.H.



PENGADILAN AGAMA NEGARA

Jln. Negara – Kandangan Km. 3,5 ☎/📠 (0517) 51421

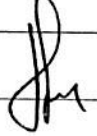
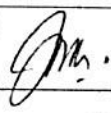
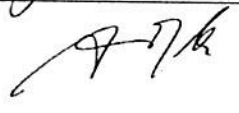
E-mail : pa.negara@gmail.com

Website : <http://pa-negara.pta-banjarmasin.go.id>

Kab. Hulu Sungai Selatan-Prov.Kalsel

ABSENSI

Jenis Kegiatan : Rapat Koordiansi
Nama Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
Hari/Tanggal : Jumát, 31 Januari 2020
Waktu : 10.00 WITA s.d selesai
Tempat : Aula Pengadilan Agama Negara

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Hj. St. Zubaidah, S.Ag.,S.H.,M.H.	Wakil Ketua	
2.	H. Abdul Khaliq, S.Ag.	Sekretaris	
3.	H. Husnan Taparrod, S.H.	Panitera	
4.	Nur Hendra Riyadi, S.H.	Kasubag Umum dan Keuangan	
5.	Ahmad Abdul Hakam	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	
6.	Zulifah, S.H.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Ortala	



PENGADILAN AGAMA NEGARA

Jln. Negara – Kandangan Km. 3,5 ☎/📠 (0517) 51421

E-mail : pa.negara@gmail.com

Website : <http://pa-negara.pta-banjarmasin.go.id>

Kab. Hulu Sungai Selatan-Prov.Kalsel

NOTULEN

Hari/Tanggal/Jam	Jum'at, 31 Januari 2020
Tempat	Ruang Rapat Pengadilan Agama Negara
Pimpinan Rapat	Hj. St. Zubaidah, S.Ag.,S.H.,M.H.
Notulis	Zulifah, S.H.
Peserta	Seluruh Tim Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
Jumlah seharusnya	6 orang
Yang hadir	6 orang
Jumlah yang tidak hadir	-

1. Rapat dibuka oleh Ketua Tim
2. Ketua Tim menanyakan apa saja yang menjadi kendala dalam kebijakan keterbukaan informasi public selama bulan Januari 2019;
3. Brosur-brosur prosedur pelayanan masih belum lengkap antara brosur pengajuan gugatan, permohonan, brosur pengajuan informasi dan pengaduan sehingga perlu dilengkapi;
4. Sarana prasarana berupa meja informasi yang belum sesuai dengan ketentuan pelayanan terintegrasi (PTSP) sehingga akan ditindaklanjuti dengan pengajuan anggaran pada RKAKL tahun 2020;
5. Belum memiliki telepon antar ruangan (PABX) sehingga akan ditindaklanjuti dengan pengajuan anggaran pada RKAKL tahun 2020;
6. Belum mengembangkan system layanan berupa layanan informasi melalui email atau aplikasi online tentang layanan informasi sehingga perlu melakukan pengembangan system layanan melalui aplikasi online;
7. Rapat selesai dan dibuatkan laporan hasil monitoring dan evaluasi kebijakan keterbukaan informasi public bulan Januari 2019 untuk dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Negara.

Notulis Rapat,

Zulifah, S.H.



Pimpinan Rapat,

Hj. St. Zubaidah, S.Ag.,S.H.,M.H.



LAPORAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA PENGADILAN AGAMA NEGARA

BULAN JANUARI 2020

A. LATAR BELAKANG

Keterbukaan informasi public dan reformasi birokrasi yang dicananngkan Pengadilan Agama Negara merupakan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government) dan baik (good government). Reformasi birokrasi dilaksanakan melalui penataan organisasi, penataan proses bisnis dan peningkatan sumber manusia pada masing-masing unit dengan harapan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi public merupakan salah satu cirri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik dan bersih.

Pengadilan Agama Negara telah secara berkesinambungan dan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik. Keterbukaan infomasi public mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance) guna menjamin hak warga Negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan public dan mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-14/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403b/DJA/SK/OT.013/8/2018 tentang Penetapan Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama;
5. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara Nomor W15-A11/112/HM.00/1/2020 tentang Jenis Informasi di Pengadilan Agama Negara;
6. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara Nomor W15-A11/113/HM.00/1/2020 tentang Standar Layanan Informasi di Pengadilan Agama Negara;

7. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara Nomor W15-A11/113/HM.00/1/2020 tentang Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Agama Negara;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) kepada Ketua Pengadilan Agama Negara selaku PPID. Adapun tujuan penyusunan Laporan monitoring dan evaluasi adalah untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian keterbukaan informasi public di lingkungan Pengadilan Agama Negara untuk kemudian lebih ditingkatkan demi kepentingan public sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.

PELAYANAN MEJA INFORMASI

JENIS INFOMASI	JUMLAH PERMOHON AN	JUMLAH PERMOHONAN YANG DIKABULKAN		JUMLAH PERMOHONAN		
		SEPENUHNYA	SEBAGIAN	RAHASIA	BELUM DKUASAI/SELESAI	LAINNYA*
Perkara dan Putusan						
Kepegawai an						
Pengawasa n dan Pendisiplin an						
Anggaran dan Aset						
Lainnya**						

PUBLIKASI PUTUSAN

PERKARA SISA BULAN LALU YANG BELUM DIUPLOAD	PERKARA PUTUS	PERKARA YANG UPLOAD	SISA

NO	KRITERIA INFORMASI	KODE KRITERIA INFORMASI	HASIL MONITORING		
			Tidak Ada Informasi	Informasi tidak lengkap/update	Informasi lengkap dan update
A.	Informasi yang Wajib Diumumkan secara Berkala oleh Pengadilan				
A.1.	Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan				
1	Profil Pengadilan meliputi :				
	a. Fungsi, tugas dan yurisdiksi pengadilan	A.1.1.A			✓
	b. Struktur organisasi pengadilan	A.1.1.B			✓
	c. Alamat, telepon, faksimile, situs resmi pengadilan dan email resmi pengadilan	A.1.1.C			✓
	d. Daftar nama pejabat dan hakim pengadilan	A.1.1.D			✓
	e. Profil singkat pejabat struktural	A.1.1.E			✓
	f. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di pengadilan tersebut yang telah diverifikasi dan dikirim oleh KPK	A.1.1.F			✓
2	Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan pengadilan	A.1.2			✓
3	Biaya yang berhubungan dengan biaya proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban pengadilan	A.1.3			✓
4	Agenda sidang pada pengadilan	A.1.4			✓
A.2.	Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat				
1	Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapatkan bantuan hukum, hak atas biaya perkara Cuma-Cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan	A.2.1			✓
2	Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim dan pegawai	A.2.2			✓
3	Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegawai	A.2.3			✓
4	Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi, serta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi	A.2.4			✓
5	Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi	A.2.5			✓

6	Biaya untuk memperoleh salinan informasi	A.2.6				
A.3.	Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadlan					√
1	Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan pengadlan yang sekurang-kurangnya terdiri atas : a. Nama program dan kegiatan b. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan, serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi c. Target dan/atau capaian program dan kegiatan d. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, yang setidaknya meliputi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lain, seperti rincian DIPA, rencana kerja anggaran dan proposal	A.3.1				√
2	Ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sekarang namanya LKJIP	A.3.2				√
3	Ringkasan Laporan Keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas : a. Rencana dan laporan realisasi anggaran b. Neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku	A.3.3				√
4	Ringkasan daftar aset dan inventaris	A.3.4				√
5	Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait	A.3.5				√
A.4.	Informasi Laporan Akses Informasi Ringkasan laporan akses informasi yang sekurang-kurangnya terdiri atas: a. Jumlah permohonan informasi yang diterima b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi c. Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan, baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi yang ditolak d. Alasan penolakan permohonan informasi	A.4				√
A.5.	Informasi Lain					
	Informasi terkait tingkat kunjungan website	A.5				√
B	Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat dan Dapat Diakses oleh Publik					

B.1.	Informasi tentang Perkara dan Persidangan						
1	Semua putusan dan penetapan pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi)	B.1.1					✓
2	Informasi dalam Buku Register Perkara	B.1.2					✓
3	Data statistik perkara, antara lain jumlah dan jenis perkara	B.1.3					✓
4	Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara	B.1.4					✓
5	Laporan penggunaan biaya perkara	B.1.5					✓
B.2.	Informasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan						
1	Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh masyarakat serta tindak lanjutnya	B.2.1					✓
2	Langkah yang tengah dilakukan pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim atau pegawai yang telah diketahui publik (misalnya, sudah dimuat dalam media cetak atau elektronik)	B.2.2					✓
3	Jumlah hakim atau pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin beserta jenis pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan	B.2.3					✓
4	Inisial nama dan unit/satuan kerja hakim atau pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, jenis pelanggaran, dan bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan	B.2.4					✓
5	Putusan Majelis Kehormatan Hakim	B.2.5					✓
B.3.	Informasi tentang Peraturan dan Kebijakan						✓
1	Peraturan MA, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua MA, Surat Edaran MA yang telah disahkan atau ditetapkan	B.3.1					✓
2	Naskah semua Peraturan MA, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua MA, Surat Edaran MA yang telah disahkan atau ditetapkan yang mengikat dan/atau berdampak penting bagi publik	B.3.2					✓
3	Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan MA sesuai dengan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan	B.3.3					✓
4	rencana strategis dan rencana kerja pengadilan	B.3.4					✓
5	Informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat pengadilan dalam pertemuan yang terbuka untuk umum	B.3.5					✓
B.4.	Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian, dan Keuangan						
1	Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel dan keuangan pengadilan	B.4.1					✓

2	Standar dan maklumat pelayanan pengadilan	B.4.2				✓
3	Profil hakim dan pegawai stidaknya meliputi : a. Nama b. Riwayat pekerjaan c. Posisi d. Riwayat pendidikan e. Penghargaan yang diterima (apabila ada)	B.4.3				✓
4	Data statistik kepegawaian yang antara lain meliputi jumlah, komposisi, dan penyebaran hakim serta pegawai	B.4.4				✓
5	Anggaran pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya	B.4.5				✓
6	Surat-surat pimpinan atau pejabat pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecuali yang bersifat rahasia	B.4.6				✓
7	Agenda kerja pimpinan pengadilan atau satuan kerja	B.4.7				✓

TEMUAN TERKAIT DENGAN INFORMASI PUBLIK

1. Brosur-brosur prosedur pelayanan masih belum lengkap, antara lain :
 - Brosur pengajuan gugatan dan permohonan
 - Brosur pengajuan informasi dan pengaduan
2. Belum memiliki telepon antar ruangan (PABX)
3. Belum mengembangkan system layanan berupa layanan informasi melalui email atau aplikasi online tentang layanan Informasi.

KESIMPULAN

Perlu ditingkatkan inovasi pelayanan informasi yang berbentuk aplikasi dan peningkatan sarana dan prasarana.

REKOMENDASI :

1. Peningkatan pada sarana dan prasarana dengan dibuatkan usulan RKAKL tahun 2020
2. Pemenuhan brosur yang terkait dengan layanan
3. Melakukan pengembangan system layanan melalui aplikasi online



Negara, 31 Januari 2020
Ketua TIM

Hj. St. Zubaidah, S.Ag.,S.H.,M.H.



PENGADILAN AGAMA NEGARA

Jln. Negara – Kandangan Km. 3,5 ☎/📠 (0517) 51421

E-mail : pa.negara@gmail.com

Website : <http://pa-negara.pta-banjarmasin.go.id>

Kab. Hulu Sungai Selatan-Prov.Kalsel

Hal : Undangan

27 Februari 2020

Kepada Yth.

Seluruh Anggota Tim Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pengadilan Agama Negara

Di –

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang efektif dan efesiensi dalam implementasi pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi kebijakan keterbukaan informasi bulan Februari 2020 yang dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : 28 Februari 2020
Waktu : 10.00 s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Pengadilan Agama Negara

Demikian undangan ini disampaikan untuk dapat diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam
Ketua Tim



Hj. St. Zubaidah, S.Ag.,S.H.,M.H.



PENGADILAN AGAMA NEGARA

Jln. Negara – Kandangan Km. 3,5 ☎/📠 (0517) 51421

E-mail : pa.negara@gmail.com

Website : <http://pa-negara.pta-banjarmasin.go.id>

Kab. Hulu Sungai Selatan-Prov.Kalsel

ABSENSI

Jenis Kegiatan : Rapat Koordiansi
Nama Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik bulan Februari 2020
Hari/Tanggal : Jumát, 28 Februari 2020
Waktu : 10.00 WITA s.d selesai
Tempat : Aula Pengadilan Agama Negara

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Hj. St. Zubaidah, S.Ag.,S.H.,M.H.	Wakil Ketua	
2.	H. Abdul Khaliq, S.Ag.	Sekretaris	
3.	H. Husnan Taparroed, S.H.	Panitera	
4.	Nur Hendra Riyadi, S.H.	Kasubag Umum dan Keuangan	
5.	Ahmad Abdul Hakam	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	
6.	Zulifah, S.H.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Ortala	



PENGADILAN AGAMA NEGARA

Jln. Negara – Kandangan Km. 3,5 ☎/📠 (0517) 51421

E-mail : pa.negara@gmail.com

Website : <http://pa-negara.pta-banjarmasin.go.id>

Kab. Hulu Sungai Selatan-Prov.Kalsel

NOTULEN

Hari/Tanggal/Jam	Jum'at, 28 Februari 2020
Tempat	Ruang Rapat Pengadilan Agama Negara
Pimpinan Rapat	Hj. St. Zubaidah, S.Ag.,S.H.,M.H.
Notulis	Zulifah, S.H.
Peserta	Seluruh Tim Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
Jumlah seharusnya	6 orang
Yang hadir	6 orang
Jumlah yang tidak hadir	-

1. Rapat dibuka oleh Ketua Tim
2. Ketua Tim menanyakan apa saja yang menjadi kendala dalam kebijakan keterbukaan informasi public selama bulan Februari 2019;
3. SOP Layanan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara belum sesuai dengan pelayanan terintegrasi (PTSP) sehingga perlu dilakukan revisi SOP;
4. Masih ada bagian pelayanan belum memahami secara keseluruhan SOP pelayanan sehingga petugas pelayanan perlu memahami SOP yang menjadi acuan dan rujukan mereka dalam memberikan pelayanan;
5. Sarana prasarana berupa meja informasi yang belum sesuai dengan ketentuan pelayanan terintegrasi (PTSP) sehingga akan ditindaklanjuti dengan pengajuan anggaran pada RKAKL tahun 2020;
6. Belum memiliki telepon antar ruangan (PABX) sehingga akan ditindaklanjuti dengan pengajuan anggaran pada RKAKL tahun 2020;
7. Belum mengembangkan system layanan berupa layanan informasi melalui email atau aplikasi online tentang layanan informasi sehingga perlu melakukan pengembangan system layanan aplikasi online;
8. Rapat selesai dan dibuatkan laporan hasil monitoring dan evaluasi kebijakan keterbukaan informasi publik bulan Februari 2020 untuk dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Negara;

Notulis Rapat,

Zulifah, S.H.

Pimpinan Rapat,

Hj. St. Zubaidah, S.Ag.,S.H.,M.H.



LAPORAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA PENGADILAN AGAMA NEGARA

BULAN FEBRUARI 2020

A. LATAR BELAKANG

Keterbukaan informasi public dan reformasi birokrasi yang dicananngkan Pengadilan Agama Negara merupakan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government) dan baik (good government). Reformasi birokrasi dilaksanakan melalui penataan organisasi, penataan proses bisnis dan peningkatan sumber manusia pada masing-masing unit dengan harapan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi public merupakan salah satu cirri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik dan bersih.

Pengadilan Agama Negara telah secara berkesinambungan dan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik. Keterbukaan infomasi public mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance) guna menjamin hak warga Negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan public dan mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-14/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403b/DJA/SK/OT.013/8/2018 tentang Penetapan Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama;
5. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara Nomor W15-A11/112/HM.00/1/2020 tentang Jenis Informasi di Pengadilan Agama Negara;
6. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara Nomor W15-A11/113/HM.00/1/2020 tentang Standar Layanan Informasi di Pengadilan Agama Negara;

7. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara Nomor W15-A11/113/HM.00/1/2020 tentang Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Agama Negara;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) kepada Ketua Pengadilan Agama Negara selaku PPID. Adapun tujuan penyusunan Laporan monitoring dan evaluasi adalah untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian keterbukaan informasi publik di lingkungan Pengadilan Agama Negara untuk kemudian lebih ditingkatkan demi kepentingan publik sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.

PELAYANAN MEJA INFORMASI

JENIS INFOMASI	JUMLAH PERMOHON AN	JUMLAH PERMOHONAN YANG DIKABULKAN		JUMLAH PERMOHONAN		
		SEPENUHNYA	SEBAGIAN	RAHASIA	BELUM DKUASAI/SELESAI	LAINNYA*
Perkara dan Putusan						
Kepegawai an						
Pengawasa n dan Pendisiplin an						
Anggaran dan Aset						
Lainnya**						

PUBLIKASI PUTUSAN

PERKARA SISA BULAN LALU YANG BELUM DIUPLOAD	PERKARA PUTUS	PERKARA YANG UPLOAD	SISA

NO	KRITERIA INFORMASI	KODE KRITERIA INFORMASI	HASIL MONITORING		
			Tidak Ada Informasi	Infomasi tidak lengkap/update	Informasi lengkap dan update
A.	Informasi yang Wajib Diumumkan secara Berkala oleh Pengadilan				
A.1.	Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan				
1	Profil Pengadilan meliputi :				
	a. Fungsi, tugas dan yurisdiksi pengadilan	A.1.1.A			✓
	b. Struktur organisasi pengadilan	A.1.1.B			✓
	c. Alamat, telepon, faksimile, situs resmi pengadilan dan email resmi pengadilan	A.1.1.C			✓
	d. Daftar nama pejabat dan hakim pengadilan	A.1.1.D			✓
	e. Profil singkat pejabat struktural	A.1.1.E			✓
	f. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di pengadilan tersebut yang telah diverifikasi dan dikirim oleh KPK	A.1.1.F			✓
2	Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan pengadilan	A.1.2			✓
3	Biaya yang berhubungan dengan biaya proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban pengadilan	A.1.3			✓
4	Agenda sidang pada pengadilan	A.1.4			✓
A.2.	Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat				
1	Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapatkan bantuan hukum, hak atas biaya perkara Cuma-Cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan	A.2.1			✓
2	Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim dan pegawai	A.2.2			✓
3	Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegawai	A.2.3			✓
4	Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi, serta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi	A.2.4			✓
5	Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi	A.2.5			✓

6	Biaya untuk memperoleh salinan informasi	A.2.6			✓
A.3.	Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadalan				✓
1	Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan pengadalan yang sekurang-kurangnya terdiri atas : a. Nama program dan kegiatan b. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan, serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi c. Target dan/atau capaian program dan kegiatan d. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, yang setidaknya meliputi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lain, seperti rincian DIPA, rencana kerja anggaran dan proposal	A.3.1			✓
2	Ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sekarang namanya LKjIP	A.3.2			✓
3	Ringkasan Laporan Keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas : a. Rencana dan laporan realisasi anggaran b. Neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku	A.3.3			✓
4	Ringkasan daftar aset dan inventaris	A.3.4			✓
5	Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait	A.3.5			✓
A.4.	Informasi Laporan Akses Informasi				
	Ringkasan laporan akses informasi yang sekurang-kurangnya terdiri atas: a. Jumlah permohonan informasi yang diterima b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi c. Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan, baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi yang ditolak d. Alasan penolakan permohonan informasi	A.4			✓
A.5.	Informasi Lain				
	Informasi terkait tingkat kunjungan website	A.5			✓
B	Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat dan Dapat Diakses oleh Publik				

B.1. Informasi tentang Perkara dan Persidangan						
1	Semua putusan dan penetapan pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi)	B.1.1				✓
2	Informasi dalam Buku Register Perkara	B.1.2				✓
3	Data statistik perkara, antara lain jumlah dan jenis perkara	B.1.3				✓
4	Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara	B.1.4				✓
5	Laporan penggunaan biaya perkara	B.1.5				✓
B.2. Informasi tentang Pengawasan dan Pendiisiplinan						
1	Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh masyarakat serta tindak lanjutnya	B.2.1				✓
2	Langkah yang tengah dilakukan pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim atau pegawai yang telah diketahui publik (misalnya, sudah dimuat dalam media cetak atau elektronik)	B.2.2				✓
3	Jumlah hakim atau pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin beserta jenis pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan	B.2.3				✓
4	Inisial nama dan unit/satuan kerja hakim atau pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, jenis pelanggaran, dan bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan	B.2.4				✓
5	Putusan Majelis Kehormatan Hakim	B.2.5				✓
B.3. Informasi tentang Peraturan dan Kebijakan						
1	Peraturan MA, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua MA, Surat Edaran MA yang telah disahkan atau ditetapkan	B.3.1				✓
2	Naskah semua Peraturan MA, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua MA, Surat Edaran MA yang telah disahkan atau ditetapkan yang mengikat dan/atau berdampak penting bagi publik	B.3.2				✓
3	Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan MA sesuai dengan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan	B.3.3				✓
4	rencana strategis dan rencana kerja pengadilan	B.3.4				✓
5	Informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat pengadilan dalam pertemuan yang terbuka untuk umum	B.3.5				✓
B.4. Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian, dan Keuangan						
1	Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel dan keuangan pengadilan	B.4.1				✓

2	Standar dan maklumat pelayanan pengadilan	B.4.2						
3	Profil hakim dan pegawai stidaknya meliputi : a. Nama b. Riwayat pekerjaan c. Posisi d. Riwayat pendidikan e. Penghargaan yang diterima (apabila ada)	B.4.3						✓
4	Data statistik kepegawaian yang antara lain meliputi jumlah, komposisi, dan penyebaran hakim serta pegawai	B.4.4						✓
5	Anggaran pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya	B.4.5						✓
6	Surat-menyurat pimpinan atau pejabat pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecuali yang bersifat rahasia	B.4.6						✓
7	Agenda kerja pimpinan pengadilan atau satuan kerja	B.4.7						✓

TEMUAN TERKAIT DENGAN INFORMASI PUBLIK

1. SOP layanan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara belum sesuai dengan pelayanan terintegrasi (PTSP)
2. Masih ada bagian pelayanan belum memahami secara keseluruhan SOP pelayanan
3. Belum memiliki telepon antar ruangan (PABX)
4. Belum mengembangkan system layanan berupa layanan informasi melalui email atau aplikasi online tentang layanan informasi

KESIMPULAN

Dilakukan evaluasi dan revisi SOP dan peningkatan sarana dan prasarana

REKOMENDASI :

1. Peningkatan pada sarana dan prasarana dengan dibuatkan usulan RKAKL tahun 2020
2. Pemenuhan brosur yang terkait dengan layanan
3. Melakukan pengembangan system layanan melalui aplikasi online



Negara, 28 Februari 2020
Ketua TIM

Hj. St. Zubaidah, S.Ag.,S.H.,M.H.



PENGADILAN AGAMA NEGARA

Jln. Negara – Kandangan Km. 3,5 ☎/📠 (0517) 51421

E-mail : pa.negara@gmail.com

Website : <http://pa-negara.pta-banjarmasin.go.id>

Kab. Hulu Sungai Selatan-Prov.Kalsel

Hal : Undangan

30 Maret 2020

Kepada Yth.

Seluruh Anggota Tim Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pengadilan Agama Negara

Di –

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang efektif dan efisiensi dalam implementasi pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi kebijakan keterbukaan informasi bulan Februari 2020 yang dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : 30 Maret 2020
Waktu : 10.00 s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Pengadilan Agama Negara

Demikian undangan ini disampaikan untuk dapat diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam

Ketua Tim,



Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H.



PENGADILAN AGAMA NEGARA

Jln. Negara – Kandangan Km. 3,5 ☎/📠 (0517) 51421

E-mail : pa.negara@gmail.com

Website : <http://pa-negara.pta-banjarmasin.go.id>

Kab. Hulu Sungai Selatan-Prov.Kalsel

ABSENSI

Jenis Kegiatan : Rapat Koordiansi
Nama Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik bulan Maret 2020
Hari/Tanggal : Selasa, 30 Maret 2020
Waktu : 10.00 WITA s.d selesai
Tempat : Ruang sidang Pengadilan Agama Negara

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Hj. St. Zubaidah, S.Ag.,S.H.,M.H.	Wakil Ketua	
2.	H. Abdul Khaliq, S.Ag.	Sekretaris	
3.	H. Husnan Taparrood, S.H.	Panitera	
4.	Nur Hendra Riyadi, S.H.	Kasubag Umum dan Keuangan	
5.	Ahmad Abdul Hakam	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	
6.	Zulifah, S.H.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Ortala	



PENGADILAN AGAMA NEGARA

Jln. Negara – Kandangan Km. 3,5 ☎/📠 (0517) 51421

E-mail : pa.negara@gmail.com

Website : <http://pa-negara.pta-banjarmasin.go.id>

Kab. Hulu Sungai Selatan-Prov.Kalsel

NOTULEN

Hari/Tanggal/Jam	Selasa, 31 Maret 2020
Tempat	Ruang Rapat Pengadilan Agama Negara
Pimpinan Rapat	Hj. St. Zubaidah, S.Ag.,S.H.,M.H.
Notulis	Zulifah, S.H.
Peserta	Seluruh Tim Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
Jumlah seharusnya	6 orang
Yang hadir	6 orang
Jumlah yang tidak hadir	-

1. Rapat dibuka oleh Ketua Tim
2. Ketua Tim menanyakan apa saja yang menjadi kendala dalam kebijakan keterbukaan informasi public selama bulan Maret 2019;
3. Performance petugas dalam implementasi 5S(senyum, salam, sapa, sopan, santun) dan 5R (Ringkas, Resik, Rapi, Rawat, Rajin) masih kurang sehingga perlu diadakan Diklat PTSP bagi petugas PTSP;
4. Masih ada bagian pelayanan belum memahami secara keseluruhan SOP pelayanan sehingga petugas pelayanan perlu memahami SOP yang menjadi acuan dan rujukan mereka dalam memberikan pelayanan;
5. Sarana prasarana berupa meja informasi yang belum sesuai dengan ketentuan pelayanan terintegrasi (PTSP) sehingga akan ditindaklanjuti dengan pengajuan anggaran pada RKAKL tahun 2020;
6. Belum memiliki telepon antar ruangan (PABX) sehingga akan ditindaklanjuti dengan pengajuan anggaran pada RKAKL tahun 2020;
7. Belum mengembangkan system layanan berupa layanan informasi melalui email atau aplikasi online tentang layanan informasi sehingga perlu melakukan pengembangan system layanan aplikasi online;
8. Rapat selesai dan dibuatkan laporan hasil monitoring dan evaluasi kebijakan keterbukaan informasi publik bulan Maret 2020 untuk dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Negara;

Notulis Rapat,

Zulifah, S.H.



Pimpinan Rapat,

Hj. St. Zubaidah, S.Ag.,S.H.,M.H.



LAPORAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA PENGADILAN AGAMA NEGARA

BULAN MARET 2020

A. LATAR BELAKANG

Keterbukaan informasi public dan reformasi birokrasi yang dicananngkan Pengadilan Agama Negara merupakan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government) dan baik (good government). Reformasi birokrasi dilaksanakan melalui penataan organisasi, penataan proses bisnis dan peningkatan sumber manusia pada masing-masing unit dengan harapan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi public merupakan salah satu cirri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik dan bersih.

Pengadilan Agama Negara telah secara berkesinambungan dan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik. Keterbukaan infomasi public mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance) guna menjamin hak warga Negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan public dan mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-14/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403b/DJA/SK/OT.013/8/2018 tentang Penetapan Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama;
5. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara Nomor W15-A11/112/HM.00/1/2020 tentang Jenis Informasi di Pengadilan Agama Negara;
6. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara Nomor W15-A11/113/HM.00/1/2020 tentang Standar Layanan Informasi di Pengadilan Agama Negara;
7. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara Nomor W15-A11/113/HM.00/1/2020 tentang Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Agama Negara;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) kepada Ketua Pengadilan Agama Negara selaku PPID. Adapun tujuan penyusunan Laporan monitoring dan evaluasi adalah untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian keterbukaan infomasi public di lingkungan Pengadilan Agama Negara untuk kemudian lebih ditingkatkan demi kepentingan public sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.

PELAYANAN MEJA INFORMASI

JENIS INFOMASI	JUMLAH PERMOHON AN	JUMLAH PERMOHONAN YANG DIKABULKAN		JUMLAH PERMOHONAN		
		SEPENUHNYA	SEBAGIAN	RAHASIA	BELUM DKUASAI/SELESAI	LAINNYA*
Perkara dan Putusan						
Kepegawai an						
Pengawasa n dan Pendisiplin an						
Anggaran dan Aset						
Lainnya**						

PUBLIKASI PUTUSAN

PERKARA SISA BULAN LALU YANG BELUM DIUPLOAD	PERKARA PUTUS	PERKARA YANG UPLOAD	SISA

6	Biaya untuk memperoleh salinan informasi	A.2.6					V
A.3.	Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadlian						V
1	Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan pengadlian yang sekurang-kurangnya terdiri atas : a. Nama program dan kegiatan b. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan, serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi c. Target dan/atau capaian program dan kegiatan d. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, yang setidaknya meliputi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lain, seperti rincian DIPA, rencana kerja anggaran dan proposal	A.3.1					V
2	Ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sekarang namanya LKIP	A.3.2					V
3	Ringkasan Laporan Keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas : a. Rencana dan laporan realisasi anggaran b. Neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku	A.3.3					V
4	Ringkasan daftar aset dan inventaris	A.3.4					V
5	Informasi tentang pengumpulan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait	A.3.5					V
A.4.	Informasi Laporan Akses Informasi						
	Ringkasan laporan akses informasi yang sekurang-kurangnya terdiri atas: a. Jumlah permohonan informasi yang diterima b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi c. Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan, baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi yang ditolak d. Alasan penolakan permohonan informasi	A.4					V
A.5.	Informasi Lain						
	Informasi terkait tingkat kunjungan website	A.5					V
B	Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat dan Dapat Diakses oleh Publik						

B.1. Informasi tentang Perkara dan Persidangan					
1	Semua putusan dan penetapan pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi)	B.1.1			✓
2	Informasi dalam Buku Register Perkara	B.1.2			✓
3	Data statistik perkara, antara lain jumlah dan jenis perkara	B.1.3			✓
4	Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara	B.1.4			✓
5	Laporan penggunaan biaya perkara	B.1.5			✓
B.2. Informasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan					
1	Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh masyarakat serta tindak lanjutnya	B.2.1			✓
2	Langkah yang tengah dilakukan pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim atau pegawai yang telah diketahui publik (misalnya, sudah dimuat dalam media cetak atau elektronik)	B.2.2			✓
3	Jumlah hakim atau pegawai yang dijamai hukuman disiplin beserta jenis pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan	B.2.3			✓
4	Inisial nama dan unit/satuan kerja hakim atau pegawai yang dijamai hukuman disiplin, jenis pelanggaran, dan bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan	B.2.4			✓
5	Putusan Majelis Kehormatan Hakim	B.2.5			✓
B.3. Informasi tentang Peraturan dan Kebijakan					
1	Peraturan MA, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua MA, Surat Edaran MA yang telah disahkan atau ditetapkan	B.3.1			✓
2	Naskah semua Peraturan MA, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua MA, Surat Edaran MA yang telah disahkan atau ditetapkan yang mengikat dan/atau berdampak penting bagi publik	B.3.2			✓
3	Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan MA sesuai dengan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan	B.3.3			✓
4	rencana strategis dan rencana kerja pengadilan	B.3.4			✓
5	Informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat pengadilan dalam pertemuan yang terbuka untuk umum	B.3.5			✓
B.4. Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian, dan Keuangan					
1	Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel dan keuangan pengadilan	B.4.1			✓

MUAN TERKAIT DENGAN INFORMASI PUBLIK

1. Performance petugas PTSP perlu ditingkatkan
2. Implementasi terhadap 5 S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun) masih kurang terhadap petugas pelayanan
3. Masih ada bagian pelayanan belum memahami secara keseluruhan SOP pelayanan
4. Belum memiliki telepon antar ruangan (PABX)
5. Belum mengembangkan system layanan berupa layanan informasi melalui email atau aplikasi online tentang layanan informasi

KESIMPULAN

Dilakukan diklat PTSP dan pembinaan tentang performance petugas PTSP serta pengusulan sarana dan prasarana pendukung

REKOMENDASI :

1. Peningkatan pada sarana dan prasarana dengan dibuatkan usulan RKAKL tahun 2020
2. Pemenuhan brosur yang terkait dengan layanan
3. Melakukan pengembangan system layanan melalui aplikasi online



Negara, 31 Maret 2020

Ketua TIM

Hj. St. Zubaidah, S.Ag.,S.H.,M.H.